

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Maka masyarakat berhak untuk memperoleh pengobatan dan perawatan. Untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat, diperlukan tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik kedokterannya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hubungan yang timbul antara dokter dengan pasien dinamakan perjanjian Terapeutik. Dalam perjanjian ini, muncul persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien sebagai bentuk persetujuan tindakan medis yang diawali dengan penawaran tindakan medis oleh dokter. Hal ini yang dinamakan *Informed Consent*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakekat *Informed Consent* dalam tindakan perawatan medis dan kegunaan *Informed Consent* terhadap pasien gawat darurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematis norma dan aturan hukum yang jelas. Dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, *Informed Consent* diberikan sesaat setelah pasien sadar, setelah dokter memberikan tindakan medis karena yang utama adalah keselamatan pasien. Tanggung gugat seorang dokter untuk membayar ganti rugi jika terjadi kerugian terhadap pasien dapat dialihkan ke pihak ketiga yaitu asuransi tanggung gugat dokter.

Kata Kunci : Kesehatan, *Informed Consent*, Gawat Darurat

ABSTRACT

Health is one of the rights possessed by every citizen of Indonesia as it has been regulated in article 28 H of paragraph 1 of the Constitution. Then the community has the right to obtain treatment and care. To optimize the public health, health care personnel who carry out the required practice of medicine according to the standards of the profession and standard operating procedures. Relationships that arise between a doctor with a patient called Therapeutic agreement. In this agreement, approval of a medical action appear given by the patients as a form of consent to medical acts beginning with the bidding action medical by doctor. This is called *Informed Consent*. The purpose of this research is to analyze the nature of *Informed Consent* in the medical care Act and the usefulness of the *Informed Consent* of the patient's response to the emergency. The method used in this research is the juridical normative methods by examining in systematic norms and the rule of law. In a State of emergency, in accordance with the provisions of the regulation of the Minister of health the No. 332/MENKES/PER/III/2008, Informed Consent was given shortly after the patient is conscious, after doctors give medical action because the main thing is the safety of the patient. Sue a doctor's responsibility to pay the indemnity in case of loss against the patient can be transferred to a third party i.e. insurance responsibility was to sue the doctor.

Keywords : Health, Informed Consent, Emergency